



## Desain Proyek MRT berubah Drastis

Anggaran membengkak lebih dari 1 triliun.

**Nur Haryanto**

anto@tempo.co.id

**JAKARTA** — Asisten Sekretaris Daerah DKI Jakarta Bidang Pembangunan Mara Oloan Siregar mengatakan biaya pembangunan proyek *mass rapid transit* diprediksi bakal membengkak. Dari hasil perhitungan sementara, nilainya bertambah sekitar Rp 1,3 triliun.

Pembengkakan anggaran itu dilaporkan oleh direksi PT Mass Rapid Transit Jakarta dalam rapat dengan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Selasa lalu. PT MRT melaporkan bahwa penambahan biaya disebabkan oleh perubahan desain, perubahan spesifikasi baja pada konstruksi, dan pembebasan lahan. "Tapi penambahan itu tidak secara otomatis disetujui oleh pemerintah," kata Oloan.

Pemerintah meminta PT MRT menjabarkan dua poin perubahan penyebab dan alasan diperlukannya perubahan, desain baru yang dirancang, dan kajian desain tersebut. Khusus untuk baja, kata Oloan, perubahan dilakukan agar konstruksinya tahan gempa. "Itu standar dari pemerintah pusat," tuturnya.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan rancangan MRT mengacu pada desain dasar yang disusun sebelum tender pengerjaan berlangsung. "Kami menggunakan *basic design*," katanya, kemarin.

Dari desain dasar, Dono menambahkan, kontraktor diwajibkan membuat desain rinci berdasarkan desain dasar yang sudah ada. Syarat utamanya, desain itu berstandar internasional dan mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia. "Setelah rancangannya selesai, PT MRT Jakarta akan mengevaluasi dan menyetujui desain

yang diajukan para kontraktor," tuturnya.

Ihwal penggunaan baja, Dono mengatakan, PT MRT menggunakan standar baja yang disesuaikan dengan aturan hukum. Di Indonesia, kata dia, standar itu mengacu pada RSNI-03-1726-201x. "Demi kelancaran dan keselamatan," ujarnya.

Adapun soal pembengkakan dana untuk pembebasan lahan Oloan mengatakan, justru lebih kecil ketimbang dua penyebab lainnya. Ia mengatakan sekitar 80 persen proyek MRT dibangun di atas lahan milik negara. Itu artinya, perusahaan bisa melanjutkan pengerjaan secara simultan pada lahan yang sudah tersedia. "Selama ini seolah-olah pembebasan lahan yang andilnya paling besar," ucapnya.

Oloan mengatakan nilai Rp 1,3 triliun tersebut akan diverifikasi oleh tim dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Pemerintah Jakarta. Sebab, pendanaan proyek itu ditanggung oleh institusi tersebut. "Ini beban bersama-sama," kata Oloan.

Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah provinsi sebelumnya telah setuju penggunaan harga *appraisal* atau harga perkiraan penilai properti. Opsi ini dipilih karena pemerintah dan pemilik lahan tak mencapai kesepakatan harga.

Harga *appraisal* ini pun tak diterima masyarakat. "Kami akan lanjutkan ke pengadilan supaya cepat selesai," kata Basuki.

Basuki akan mengambil paksa lahan tersebut jika pemilik berkeras mempertahankan tanah mereka. Hal ini dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur bahwa pemerintah setempat berhak mengambil alih tanah yang posisinya tak

bisa dipindahkan dan dibutuhkan untuk kepentingan publik. "Pemilik lahan juga tak mungkin kan memindahkan tanah mereka?"

● LINDA HAIRANI | YOLANDA RYAN ARMINDYA